




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUANSI**








**OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROVINSI JAMBI**

**PPID PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

 <div>PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI</div>	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	Januari 2025
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Jambi
	Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUANSI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<div><div>1.</div><div>Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div></div> <div><div>2.</div><div>PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</div></div> <div><div>3.</div><div>Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</div></div> <div><div>4.</div><div>Perda Provinsi Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi</div></div> <div><div>5.</div><div>Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763 / KEP.GUB/DISKOMFO 3.1/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi</div></div> <div><div>6.</div><div>Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 05/DLH 1-1/2025 Tentang Pejabat Pengelola Informais dfan Dokumentasi</div></div>	<div><div>1.</div><div>Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik</div></div> <div><div>2.</div><div>Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi</div></div> <div><div>3.</div><div>Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnya</div></div> <div><div>4.</div><div>Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan</div></div> <div><div>5.</div><div>Mampu mengoperasikan komputer dan internet</div></div> <div><div></div><div>Mampu bekerja sama dalam tim</div></div>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<div><div>1.</div><div>SOP Permintaan Informasi Publik</div></div> <div><div>2.</div><div>SOP Pengajuan Keberatan</div></div> <div><div>3.</div><div>SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi</div></div>	<div><div>1.</div><div>Komputer/Laptop</div></div> <div><div>2.</div><div>Internet</div></div> <div><div>3.</div><div>Alat Tulis Kantor</div></div> <div><div>4.</div><div>Printer/mesin fotokopi</div></div> <div><div>5.</div><div>Telepon</div></div>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<div><div>1</div><div>Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan</div></div>	<div>Dicatat dalam buku laporan pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik</div>

STANDAR OPERASIONAL PENGUJIAN KONSEKUANSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	90 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang Undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 Menit	Rekap Peraturan Perundang-Undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang- Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	30 Menit	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	

KEPALA DINAS



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002